

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan penelitian, dan hasil serta pembahasan dari penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1) Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka

- a) Implementasi kebijakan kurikulum merdeka yang diterapkan di SMA Negeri 1 Grabag secara keseluruhan sudah dilaksanakan dengan cukup baik, hal ini didukung oleh kebijakan dengan sistem pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, sehingga kegiatan pembelajaran berlangsung menyenangkan. Selain itu satuan pendidikan mempunyai keleluasaan untuk menyusun kurikulum dan program pembelajaran meskipun kebijakan ini bersifat *topdown*. Target kebijakan juga memiliki motivasi belajar dan keinginan mengikuti perubahan yang lebih baik, meskipun dalam awal pelaksanaan masih banyak mengalami kendala. Implementasi kebijakan kurikulum merdeka ini juga didukung adanya lingkungan internal yang mendukung dari pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Pelaksana kebijakan sudah memahami peran dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan sesuai dengan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2024. Sehingga secara keseluruhan implementasi kebijakan kurikulum merdeka di SMA negeri 1 Grabag sudah cukup memenuhi lima tepat kebijakan sebagaimana menurut teori yang dikembangkan oleh Riant Nugroho.
- b) Beberapa ketepatan sudah memenuhi kriteria yang cukup baik untuk mendukung implementasi kebijakan kurikulum merdeka, ketepatan

tersebut diantaranya, (1) ketepatan kebijakan; (2) ketepatan pelaksanaan; (3) ketepatan target.

- c) Meskipun beberapa ketepatan sudah memenuhi kriteria untuk mendukung implementasi yang baik, pada dua ketepatan ini masih ditemukan beberapa temuan yang berpotensi menjadi penghambat implementasi. Adapun dua ketepatan tersebut adalah ketepatan lingkungan dan ketepatan proses.

2) Faktor Pendukung dan Penghambat

- a) Terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kurikulum merdeka di SMA Negeri 1 Grabag. Faktor pendukung dalam implementasi kebijakan kurikulum merdeka ini diantaranya standar dan tujuan yang digunakan, ketersediaan sumber daya pelaksana kebijakan, karakteristik agen pelaksana, dan disposisi/sikap pelaksana. Sedangkan faktor penghambat dalam implementasi kebijakan kurikulum merdeka ini diantaranya keterbatasan sarana dan prasarana, komunikasi antar organisasi, rendahnya keterlibatan orang tua, dan disorientasi guru.
- b) Faktor pendukung dari implementasi kebijakan kurikulum merdeka diantaranya. (1) standar dan tujuan kebijakan yang jelas dari tingkat nasional sampai dengan satuan pendidikan; (2) Dukungan sumber daya manusia pelaksana kebijakan berupa ketersediaan pendidik dan tenaga kependidikan yang tercukupi dan memiliki kualifikasi yang sesuai peraturan; (3) Dukungan dari agen pelaksana, bahwa untuk menerapkan kurikulum merdeka, agen pelaksana terdiri dari berbagai pihak yang memiliki tujuan yang sama, yaitu transformasi pendidikan; (4) Dukungan

sikap/disposisi pelaksana kebijakan yang kemauan untuk belajar dan berproses pada perubahan baru dalam bidang pendidikan.

- c) Faktor penghambat dari kebijakan implementasi kurikulum merdeka adalah, (1) Ketersediaan sumber daya anggaran yang hanya bersumber pada anggaran BOS, yang berdampak pada kurangnya fasilitas pendukung dalam implementasi kurikulum merdeka; (2) Komunikasi organisasi, karena belum efektifnya komunikasi pelaksana kebijakan di satuan pendidikan; (3) Minimnya keterlibatan komite dan orang tua, baik dalam penyusunan kurikulum satuan pendidikan maupun program kerja sekolah; (4) Disorientasi guru, karena perbedaan cara pandang, pola pikir, dan usia dalam menghadapi perubahan kebijakan.

5.2 Rekomendasi

Memperhatikan hasil penelitian dan simpulan dari penelitian ini, peneliti memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan untuk mewujudkan sistem pembelajaran dengan menggunakan Kurikulum Merdeka, sebagai berikut.

- 1) Satuan pendidikan perlu untuk, (1) melibatkan orang tua dan komite dalam pembuatan kebijakan maupun pelaksanaan program kegiatan untuk meningkatkan partisipasi lingkungan eksternal; (2) mendorong partisipasi pendidik dalam membentuk komunitas belajar, tidak hanya melalui MGMP. Hal ini dimaksudkan untuk mendorong terciptanya lingkungan akademis yang adaptif terhadap perkembangan dunia pendidikan; (3) mengawal setiap hasil evaluasi yang sudah disepakati, sehingga evaluasi kegiatan maupun program bukan sekedar untuk formalitas; (4) pemerintah daerah sudah cukup

proaktif dalam melaksanakan pendampingan pengembangan kurikulum merdeka, namun masih perlu melakukan pendampingan secara menyeluruh kepada pendidik, bukan hanya melalui ketua MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) dan/atau MKKS (Musyawarah Kerja Kepala Sekolah).

- 2) Beberapa rekomendasi untuk mengatasi hambatan implementasi kebijakan kurikulum merdeka, diantaranya dengan (1) satuan pendidikan menjalin kerjasama atau kemitraan dengan pihak swasta untuk mendapatkan dukungan anggaran dari pihak luar dan/atau meningkatkan alokasi anggaran untuk program P5, sehingga peserta didik tidak dibebani iuran dan meningkatkan alokasi anggaran untuk penyediaan internet bagi peserta didik; (2) menyediakan form evaluasi kurikulum untuk menghimpun kritik, saran, dan masukan dari guru secara keseluruhan, sehingga komunikasi yang terjadi tidak hanya satu arah; (3) melibatkan komite dan perwakilan orangtua peserta didik dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS); dan (4) mengadakan kegiatan pelatihan atau *workshop* untuk guru minimal triwulan sekali, untuk mendorong peningkatan keterampilan dan pengetahuan guru dalam melaksanakan kurikulum merdeka sehingga dapat mengatasi disorientasi kurikulum;